

Menalar Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian Di Kawasan Priangan Timur Jawa Barat

Benyamin Melatnebar¹⁾

benyamin.melatnerbar@ubd.ac.id

Baghas Budi Wicaksono²⁾

baghas.budi@ubd.ac.id

Kito Kurniawan³⁾

kito.kurniawan@ubd.ac.id

^{1) 2) 3)}Universitas Buddhidharma

Abstract

Riset ini memiliki tujuan guna menganalisa pengaruh faktor belanja modal pemerintah daerah terhadap produktivitas pertanian di Kawasan Priangan Timur, yakni Kabupaten Ciamis, Garut dan Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan data sekunder tiga kabupaten selama tahun 2012 hingga tahun 2017 mengenai sektor pertanian di Kawasan Priangan Timur yang ditinjau dari instrumen fiskal seperti belanja pemerintah daerah urusan pertanian serta produktivitas pertanian. Riset ini dilaksanakan guna menentukan pengaruh Belanja Pengeluaran Pemerintah serta Pendapatan Asli pada Kawasan Priangan Timur di provinsi Jawa Barat. Kajian ini lebih memfokuskan fokus pada bidang tertentu yakni sektor agricultural dikarenakan pada sector ini paling banyak yang menyerap pengeluaran terbesar di badingkan sektor – sektor lainnya. Dalam melakukan analisis data pada riset ini, menggunakan Analisa linier regresi sederhana dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis – hipotesis yang disodorkan, juga mendapatkan dukungan. Riset ini menerapkan penelitian secara deskriptif quantitative, juga menggunakan data sekunder, memakai informasi data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik. Dari hasil riset ini membuktikan bahwa belanja pemerintah pada sektor agricultural dari beberapa hipotesa yang diajukan ada yang berpengaruh positif signifikan namun ada pula yang berpengaruh negatif tidak signifikan

Kata kunci: Produktivitas pertanian, Sektor Agrikultural, Badan Pusat Statistik, Instrumen fiskal, Analisis Linier Regresi

Reasoning Local Government Expenditures on Gross Domestic Product in the Agricultural Sector in the Priangan East West Java Region

Abstrak

This research aims to analyze the influence of local government capital expenditure factors on agricultural productivity in the East Priangan Region, namely Ciamis, Garut and Tasikmalaya districts. This study uses secondary data from three districts during 2012 to 2017 regarding the agricultural sector in the East Priangan Region in terms of fiscal instruments such as local government spending on agricultural affairs and agricultural productivity. This research was conducted to determine the effect of Government Expenditure and Original Income in the East Priangan Region in the province of West Java. This study focuses more on a particular field, namely the agricultural sector because this sector absorbs the largest expenditure compared to other sectors. In analyzing the data in this research, using simple linear regression analysis and multiple linear regression. The results showed that the proposed hypotheses also received support. This research applies descriptive quantitative research, also uses secondary data, using data information presented by the Central Statistics Agency. The results of this research prove that government spending on the agricultural sector from the proposed hypotheses has a significant positive effect but some has an insignificant negative effect.

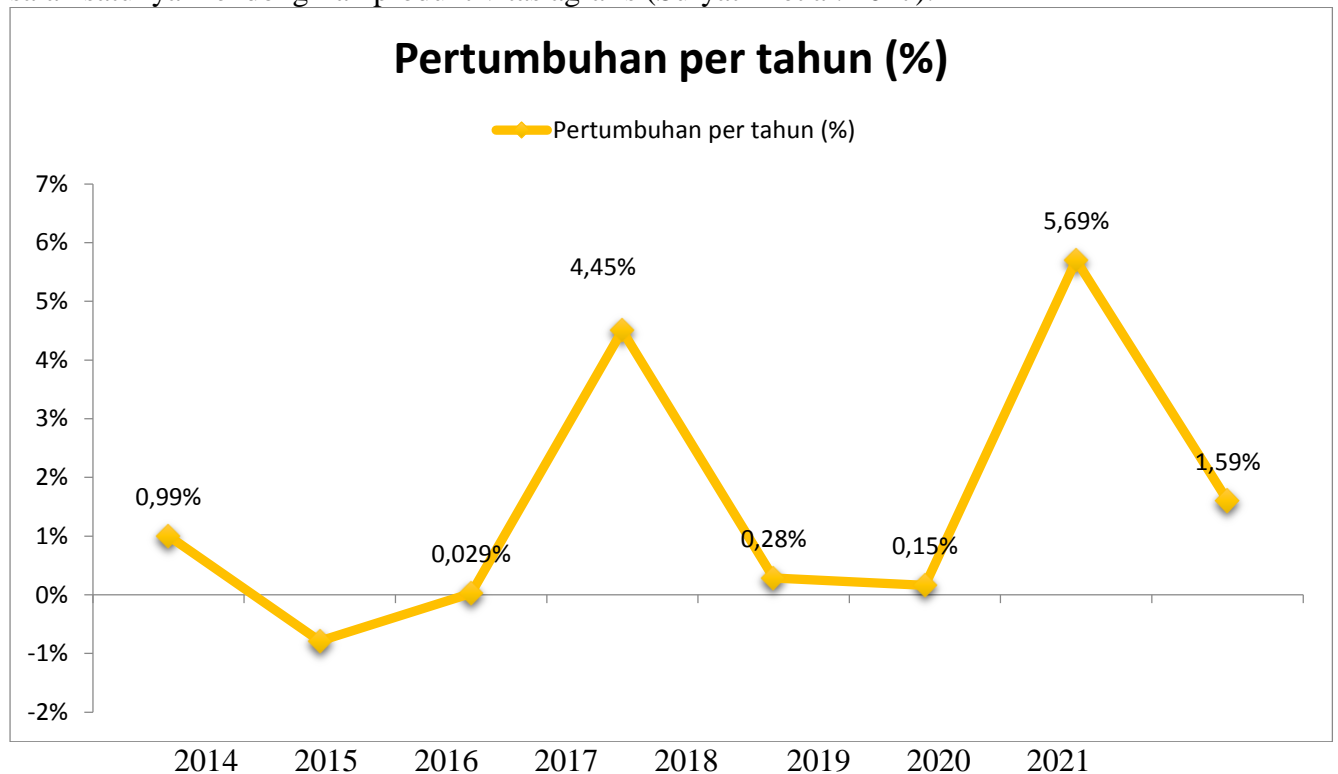
Keywords: Agricultural productivity, Agricultural sector, Central Bureau of Statistics, Fiscal Instruments, Linear Regression Analysis

PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang memiliki faktor sumber daya alam dan kondisi demografis dan bagian dari provinsi utama lain yang berperan besar pada pembangunan ekonomi secara holistik. Kualitas ekonomi Jawa Barat merikat pada adanya kontribusi *stakeholder, government as the regulator* berkaitan dengan peraturan dan kegiatan intensif perekonomian mikro oleh rumah tangga produsen dan konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut, secara normatif Jawa Barat memerlukan *economic planning* secara dinamis, reliable atau dapat diandalkan, serta memiliki resistensi dalam mewujudkan perekonomian regional yang dinamis. Adapun tujuan dalam RPJP Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2024 yakni mendongkrak ekonomi regional yang mempunyai *competitiveness* atau kemampuan bersaing melalui berbagai peran masing-masing sektor ekonomi agar dapat mempercepat *economic inclusive developing* di setiap region. Berbicara terkait pembangunan ekonomi, baiknya pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk menggenjot penerimaan daerah Propinsi Jawa Barat meningkatkan jumlah pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang hasil pertanian tertentu dari kelompok Pengusaha Kena Pajak (PKP) Petani dengan tarif 1%. Sehingga diperlukan aturan-aturan yang tepat berkaitan dengan perhitungan pembayaran pajak terutang yang harus dibayarkan PKP Petani. (Melatnebar 2018)

Pajak dapat dengan leluasa dikatakan sebagai tanggung jawab warga negara (dalam hal ini para Petani PKP) dalam peran sukarela dan kasat mata warga negara dalam peran sukarela oleh anggota masyarakat untuk mendukung berbagai kebutuhan negara. (Melatnebar 2021) dan (Melatnebar 2019)

Dalam rangka mendongkrak produktivitas akumulasi *economy fields competitive*, salah satunya mendongkrak produktivitas agraris (Suryatini et al. 2017).



Ilustrasi 1.1
PDRB Sektor Agraris Jawa Barat menurut

Constant price 2014 selama 8 tahun (2014-2021)

Pada ilustrasi 1.1 diatas, Sejak 2014 hingga 2021 output sektor agraris di Jawa Barat mempunyai tren fluktuatif dan mengalami kenaikan. Meskipun dari tahun 2014 mengalami kontraksi hingga minus 0,79% namun pada tahun 2015 hingga 2016 mengalami penurunan, namun secara rata-rata pertumbuhan sektor pertanian Jawa Barat sebesar 1,59 %.



(Sumber : Survei Agraris Kementerian pertanian, 2021. Data diolah)

Ilustrasi 1.2
Rasio Hasil Agraris Comodity Terbesar
Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Menurut ilustrasi 1.2 masing - masing daerah di Jawa Barat mempunyai komoditas andalan saat menghasilkan output pada beberapa sub sektor agraris. Pada subsektor beras, rempah - rempah serta horti kultura diungguli oleh wilayah dengan luas lahan tani yang signifikan contohnya Bogor dan Tasikmalaya

Dapat diketahui bahwa belanja urusan pertanian di Jawa Barat memiliki rasio 1,56% dari total APBD Provinsi Jawa Barat. Bertambahnya *government expenditure* pada agraris *fields* di provinsi Jawa Barat telah mencapai tren penurunan. Berdasarkan latar belakang diatas, adapun beberapa riset telah diimplementasikan oleh (Edeme et al. 2018), (Hu and McAleer 2003), (Freund and Weinhold 2004), dan (Gong et al. 2020) mengenai analisis pengaruh belanja urusan pertanian terhadap peningkatan output pertanian.

Tujuan dari riset ini yakni untuk menemukan korelasi belanja urusan pertanian terhadap produktivitas agraris *sectors output*, untuk mengetahui korelasi komponen *expenditure* langsung terhadap produktivitas agraris *sectors output*

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut bisa dijalankan untuk sumbangan konsep kerangka bagi riset lain secara makroprodensial dengan memakai informasi yang mutakhir, teristimewa terkait riset produktivitas output agraris *sector* di Jawa Barat, *as material information* yang kredibel serta reliabel bagi pengamatan output di agraris *sector* teristimewa

pada provinsi Jawa Barat, khususnya yang berurusan dengan agraris *sector* dan *government regulation* pada kebijakan pertumbuhan perekonomian daerah.

Langkah-langkah pada riset ini yakni:

Tahap 1: melakukan pengamatan obyek penelitian, literatur pustaka, kolektifitas data primer atau sekunder. Tahap 2: melakukan olah data, menyajikan hasil penelitian, menyimpulkan hasil penelitian dan saran atau memberikan solusi atas penelitian yang dilakukan. Tahap 3: membuat laporan penelitian dan publikasi ilmiah.

TINJAUAN PUSTAKA

Muncul teori yang *describe* terkait produktivitas ekonomi yakni;

1. Teori Keynesian

Opini Keynes (dikutip dalam Sukirno, 2013), permintaan adalah sebuah ukuran kegiatan ekonomi yang *dependent* dalam produktivitas ekonomi, yaitu dalam artian adanya simbiosis mutualisme dalam belanja agregat di periode tertentu. Belanja agregat yakni uang dalam jangka waktu tertentu pada suatu waktu dengan mengeksekusi *product and services purchasing* yang merupakan output dari produktivitas ekonomi. Dan seterusnya dicapai oleh kebijakan moneter keuangan, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Indonesia dengan segenap hati senantiasa membuat kebijakan yang tepat terkait permintaan tadi untuk mempengaruhi hal ini dan selalu mengembangkan kebijakan lainnya. Ada beberapa hal penting yang Anda butuhkan dalam belanja agregat seperti; belanja *government*, investasi oleh perusahaan swasta untuk *household consumption*, *export* dan dokumen tertulis. Sehingga apabila dikorelasikan tergantung pada kinerja atau *economy performance* pada belanja agregat untuk itu penjualan ekonomis dengan biaya total diakui di sisi permintaan. Kontak ini adalah salah satu permintaan yang paling banyak diminta secara agregat.

2. Teori Wagner

Teori ini menekankan pada pengeluaran pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi yang tampaknya memang memiliki hubungan yang sama. Berdasarkan hal ini, jika pendapatan individu ada peningkatan maka nantinya peningkatan terkait dalam pengeluaran pemerintah akan terjadi, dan mengambil sebagian besar dari PDB. Hal ini karena kebutuhan pemerintah dalam mengatur hubungan dari antara masyarakat, pendidikan, hukum, dan dan seterusnya. Selain itu, teori Wagner mengkritik apa yang disebut teori organik situasi. Ini mengasumsikan bahwa pemerintah adalah orang yang bebas untuk melakukan sesuatu. Wagner juga menunjukkan bahwa ada sejumlah faktor yang menciptakan pengeluaran pemerintah terus berkembang, (Sukirno, 2013).

Berdasarkan penjabaran dari deskripsi di atas, sehingga peneliti hendak mengumpulkan poin – poin yang dirasa penting guna melengkapi temuannya menjadi pertanyaan, yang nantinya akan di uraikan pada bab 3 Hasil dan Pembahasan. Menurut *background* atas problema yang telah dijabarkan diatas, *formulation of the problem* pada riset ini mengerucut kepada dua *statement* pertanyaan yakni: Apakah Belanja urusan pertanian memiliki korelasi berarti pada produktivitas output di sektor pertanian? Kemudian apakah Komponen Belanja Langsung (barang dan jasa, pegawai, dan modal) berkorelasi secara berarti pada Produktivitas output sektor pertanian? Sehingga dari pertanyaan ini, semoga nantinya bisa merepresentasikan apa yang menjadi keinginan dari akademisi khususnya untuk mendalami topik terkait Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian Di Kawasan Priangan Timur Jawa Barat dan ke depannya bisa menyajikan pertanyaan tambahan berdasarkan dua pertanyaan yang sudah peneliti sampaikan di atas

Sebagai generasi penerus bangsa yang besar ini, kita diharapkan untuk senantiasa berperan serta secara aktif, sebagai contoh bagi para akademisi dengan mengembangkan ilmu

yang diperoleh dan sebesar – besarnya harus dapat bermanfaat bagi bangsa tercinta ini, maka dari itu keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dapat terjaga. *Maintain, fixing* serta bergiat dalam pembangunan yang hakiki bagi popularitas bumi Nusantara. Senantiasa Membantu pemerintah dalam *maintain* bangsa Indonesia dengan mengimplementasikan tambal sulam di setiap sektor, teristimewa sektor agrikultural yang merupakan kebanggaan Indonesia karena sebagian besar memang penduduknya bermatapencarian sebagai petani. Sektor pertanian ini harus senantiasa digenjut daripada harus melakukan import beras yang baru – baru ini memang harus pemerintah lakukan dari Thailand. Supaya Indonesia unggul di bidang pertanian, karena memang dari segi belanjanya, sektor agricultural inilah yang paling meningkat tajam. Maka dari itu harus menjadi prioritas utama dari sudut pandang pemerintah. Karena pemerintah Indonesia ingin segera bermigrasi dari negara berkembang menjadi sebuah negara maju yang selalu memiliki progresivitas yang baik. (Wuarmanuk 2019). Progresivitas suatu bangsa yang *strong* benar harus menjaga bidang perekonomiannya supaya selalu bertumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Salah satu pilihan yang dijalankan oleh *government* guna mendongkrak produktivitas ekonomi suatu negara ini yakni melalui perhatian penuh pada sektor agricultural bangsa karena secara hakiki pertanian ini merupakan keunggulan bangsa Indonesia. Bagaimana caranya agar pendapatan di sektor agrikultural selalu menjadi yang paling populer bila dibandingkan dengan sektor – sektor lainnya. Memang tidak ditampik bahwa beberapa sektor lainnya juga unggul. Tapi kita tidak boleh melupakan keunggulan kita di bidang pertanian dari masa ke masa dan selalu harus kita jaga sedemikian rupa. Sehingga sektor pertanian selalu menjadi primadona dan ikut kontribusinya paling signifikan guna mengembangkan dan memajukan negara kesatuan ini. *Scope* segi ekonomi menunjuk kepada sektor agricultural yang menjadi jagoan kita. Supaya menjadikan Indonesia menjadi negara hebat sekarang dan seterusnya

METODE PENELITIAN

Informasi yang dipakai pada riset ini yakni sekunder *quantitative data*. Bentuk informasi yang dipakai yakni sekunder *quantitative data* dari tahun 2012 hingga tahun 2017 memakai *scope* riset sebanyak tiga Kabupaten pada provinsi Jawa Barat.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data penelitian adalah informasi institusi terkait seperti Dirjen PK Kemenkeu serta BPS. Informasi pada riset ini didapat via *library research method* meliputi studi kepustakaan, karya ilmiah serta jurnal yang berkaitan sesuai *agricultural development topic* serta ekonomi daerah. Setelah itu dilaksanakan *interpretation* korelasi belanja *government due to* produktivitas regional pada sektor agrikultural di Priangan Timur Jawa Barat

1. Objek Riset

No	Variable	Measurement	Satuan	Sumber
1.	Produktivitas Regional Bruto Pertanian	Rasio Output agrikultural terhadap <i>agricultural sector</i> di Jawa Barat	Rupiah	Biro Pusat Statistik
2.	Belanja Pemerintah Daerah pada sektor pertanian	<i>Government Expenditure</i> / APBD Kabupaten serta Kota di Jawa Barat pada <i>agricultural sector</i>	Rupiah	Kementerian Keuangan

3.	Subsektor Agrikultural Expenditure	<i>Expenditure</i> subsektor agrikultural di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat.	Persen	DJPk Kementerian Keuangan
4.	Komponen <i>Direct Expenditure</i>	Expenditure Barang dan jasa, SDM dan modal untuk agricultural <i>sector</i> di Jawa Barat	Persen	DJPk Kementerian Keuangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PEMBAHASAN

Belanja Daerah

Berdasarkan PP 13/ 2006 pasal 31 menyatakan regional *expenditure* dapat dipakai untuk membiayai *government business* yang jadi otonomi provinsi atau kabupaten meliputi *option matter* dan *mandatory matter*. Adapun pembagian belanja daerah diklasifikasi ke dalam dua jenis, yaitu :

a. *Mandatory expenditure matter*

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri 13/ 2006 *article 32* ada 20 fungsi *Mandatory expenditure matter* yakni kesehatan, perumahan rakyat dan pekerjaan umum, penataan ruangan, agraria, kependudukan serta sumber daya manusia.

b. *Option Expenditure Matter*

Menurut pasal 24 pada PP No. 13/ 2006, komponen *Option Expenditure Matter* yakni *fisheries, agriculture, forestry, tourism, marine, energy and mineral resources and trade*.

Berdasarkan *article 24* peraturan Menteri dalam negeri 13/ 2006, ada beberapa poin telah muncul pada setiap *option expenditure matter* dan *mandatory expenditure matter* yaitu:

1) *Direct Expenditure*

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri 13/ 2006 *article 36 clause 2*, *Direct Expenditure* memiliki komponen: (1) *Personnel Expenditures*, (2) *Goods and Services Expenditures*, (3) *Capital Expenditures*.

2) *Indirect Expenditure*

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri 13/ 2006 *article 36 clause 2*, *Indirect Expenditure* memiliki komponen: *Spending on grants, subsidies, social assistance, unexpected and financial*.

Hipotesa Riset

Beberapa hipotesa pada riset ini, yaitu :

- Belanja modal, pegawai, dan barang jasa pada agrikultural *sector* dianggap berkorelasi signifikan pada hasil agrikultural di wilayah Jawa Barat
- Belanja Urusan agrikultural dianggap berkorelasi signifikan pada hasil agrikultural di wilayah Jawa Barat

Analisis Hasil Penelitian

Variabel	Persamaan 1			Persamaan 2		
	Coefficient	t-statistic	Prob.	Coefficient	t-statistic	Prob.
C	0.02346	8.1618	0.00	0.03066	7.2898	0.00
XPND_PGN	0.00154	2.2615	0.01			
XPND_IKN	0.00023	0.3926	0.84			

XPND_TNK	0.00054	1.4148	0.10		
XPND_HUT	0.00126	2.5407	0.00		
XPND_P				0.00487	4.9233
XPND_M _{t-2}				0.00258	3.2561
XPND_BBJ				0.00927	8.4489
R-Squared	0.8527			0.86468	
F-statistic	42.0592			30.1509	
Prob (stat)	0.00			0.00	

Source: Data processed

Keterangan Variabel

Y	=	<i>Agricultural Output to Labor in the Agricultural Sector</i>
XPND_PGN	=	<i>expenditure on food crops and horticulture sub-sectors to total expenditure in the agricultural sector</i>
XPND_HUT	=	<i>plantation and forestry sub-sector spending</i>
XPND_TNK	=	<i>livestock sub-sector spending</i>
XPND_TNK	=	<i>Fisheries and marine sub-sector spending</i>
XPND_P	=	<i>Total Personnel Expenditure on Labor in the Agricultural Sector</i>
XPND_M	=	<i>Total Capital Expenditure for Labor in the Agricultural Sector</i>
XPND_BBJ	=	<i>Total expenditure on goods and services to labor in the agricultural sector</i>

Pengaruh Belanja Urusan Pertanian pada Produktivitas Bruto

Menurut *output* estimasi model pertama diatas, bisa dipahami; belanja urusan pertanian subsektor pangan, kehutanan dan ternak memiliki nilai signifikansi dibawah 5% yang mengindikasikan pengaruh positif pada variabel produktivitas bruto. Adapun *value* daripada R-Squared senilai 0,82 memiliki arti *independent variable* yang diteliti mampu *explain* perubahan *dependent variable variation*, sedangkan sisa koefisien yakni 0,18 adalah variabel lain diluar model.

Pengaruh Belanja Langsung pada Produktivitas Bruto

Menurut *output* estimasi model kedua diatas, bisa dipahami; *direct expenditure* yang ditinjau *from goods and services expenditure*, pegawai, serta *capital* secara simultan mempengaruhi PDRB pertanian secara signifikan. Adapun nilai signifikansi memiliki nilai dibawah 5% dan nilai R-Squared; 0,87 yang memiliki arti; *independent variable* pada model ini mampu *describe* variasi perubahan *dependent variable* sebanyak 86 %, sedangkan sisa koefisien sebesar 0,13 adalah variabel lain diluar model yang tidak diteliti.

KESIMPULAN

Pembangunan ekonomi di wilayah Jawa Barat tidak terlepas dari produksi pertanian. Hal ini didukung oleh fakta penelitian yang kuat, yaitu sebagai berikut:

- 1.) Pengeluaran untuk sektor pertanian pada subsektor pangan, perikanan, pertanian, kehutanan dan peternakan berpengaruh signifikan terhadap produksi pertanian. Hal ini menyoroti pentingnya menjaga alokasi anggaran dan meningkatkan alokasi anggaran untuk pengembangan sektor pertanian di Jawa Barat, khususnya wilayah Priangan Timur.
- 2.) Belanja langsung barang dan jasa, belanja modal, dan komponen tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap produksi pertanian. Hal ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus terus memperhatikan alokasi biaya langsung guna menopang berfungsinya sektor pertanian di Jawa Barat agar lebih efisien.

REFERENCES

- Edeme, Richardson Kojo, Ugbor, I. Kalu, Chisom Emecheta, and Ebikabowei Biedomo Aduku. 2018. "Analysis of The Impact of Inflation Reduction on Output and Unemployment in Nigeria." *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 10(1). doi: 10.17977/um002v10i12018p074.
- Freund, Caroline L., and Diana Weinhold. 2004. "An Empirical Investigation of the Internet and International Trade: The Case of Bolivia." *Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico*. doi: 10.35319/lajed.20042319.
- Gong, Zhenxing, Ying Zhang, Jinfeng Ma, Yao Liu, and Yujia Zhao. 2020. "Erratum: Effects of Work Passion on Turnover Intention for Chinese Government Employees: The Dualistic Model of Passion Perspective (Journal of Management and Organization (2018) DOI: 10.1017/Jmo.2017.71)." *Journal of Management and Organization* 26(4).
- Gujarati, D. (2005). *Basic Econometrics*. New York: McGraw-Hill Higher.
- Hu, B. D., and M. McAleer. 2003. "Time Series Analysis of Aggregate Consumption in China." in *MODSIM 2003: INTERNATIONAL CONGRESS ON MODELLING AND SIMULATION, VOLS 1-4: VOL 1: NATURAL SYSTEMS, PT 1; VOL 2: NATURAL SYSTEMS, PT 2; VOL 3: SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS; VOL 4: GENERAL SYSTEMS*.
- Melatnebar, Benyamin. 2018. "ANALISIS SELISIH PAJAK PENGHASILAN STUDI KASUS PADA PT. SSE VAN DER HORST INDONESIA." *Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis* 16(3):68–77.
- Melatnebar, Benyamin. 2019. "MENYOAL E-SPT PPH PASAL 23/26 DAN PKP TERDAFTAR TERHADAP PENERIMAAN PPH 23/26 SERTA TAX PLANNING SEBAGAI VARIABEL INTERVENING." *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)* 4(2):49–68.
- Melatnebar, Benyamin. 2021. "Pengkreditan Pajak Penghasilan Pasal 24 Sebagai Perencanaan Pajak Yang Efektif." *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)* 6(1):47–70. doi: <https://doi.org/10.52447/jam.v6i1.4593>.
- Sukirno, S. (2013). *Makroekonomi Teori Pengantar (Teori Pengantar Edisi Ketiga ed.)*. Jakarta: Rajawali Press

Suryatini, Dwi, Ina Primiana, Umi Kaltum, and Yudi Azis. 2017. "THE EFFECT OF RELATIONSHIP AND COMPETITIVE STRATEGY ON BUSINESS PERFORMANCE OF RATTAN INDUSTRY IN JAVA." *Academy of Strategic Management Journal* 16(3).

Wuarmanuk, Benyamin Melatnebar. 2019. "Questioning the E-Invoicing System, Tax E-Billing & E-Filing Systems against Amount of VAT Receipt [Menyoal Sistem E-Faktur, Kanal E-Billing Pajak & E-Filing Terhadap Jumlah Penerimaan PPN]." *Proceeding of Community Development* 2:532–46. doi: <https://doi.org/10.30874/comdev.2018.340>.